

ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI PEMODERASI KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KARESIDENAN KEDIRI

Linawati¹

linawati@unpkediri.ac.id

Mar'atus Solikah²

solikah@unpkediri.ac.id

Badrus Zaman³

badrus.zaman@unpkediri.ac.id

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, UN PGRI Kediri

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan alokasi belanja modal sebagai moderator kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri. populasi dalam penelitian ini adalah Kota dan kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga didapatkan sampel penelitian adalah 7 daerah kota dan kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri. Data penelitian merupakan data sekunder, yang meliputi data realisasi APBD dan pertumbuhan ekonomi daerah kota dan kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri dari tahun 2009-2016. Analisis data menggunakan analisis MSEM (*Moderating Structural Equation Modeling*) dengan software AMOS 21. Hasil penelitian menunjukkan (1) kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; (2) alokasi belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien path yang positif menunjukkan bahwa semakin baik alokasi belanja modal maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat; (3) variabel moderator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal dapat menjadi variabel moderator dari pengaruh antara kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja modal

PENDAHULUAN

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (PP No. 58 Tahun 2005). Dengan adanya otonomi daerah,

pengelolaan keuangan sepenuhnya diserahkan pada pemerintah daerah, baik secara umum maupun secara khusus yaitu APBD. Penyelenggaraan keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan optimal apabila terdapat keseimbangan antara sumber-sumber penerimaan daerah dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengkaji kemampuan alokasi belanja modal dalam memoderasi kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara optimal. Pelaksanaan pengelolaan daerah membutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi yang diwujudkan berupa anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah memerlukan penilaian untuk mengetahui tingkat pengelolaan keuangannya, apakah pengelolaan yang dilakukan sudah efektif dan efisien (Astuti, 2015). Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 pasal 4 tentang pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money*, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dan penilaian kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Penilaian kinerja pengelolaan daerah dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja (Mahmudi, 2010). Menurut Halim (2007), berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD, perbandingan antara komponen – komponen yang terdapat pada APBD dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan tersebut dapat meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka dapat mendorong

peningkatan perekonomian daerah, yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sari, dkk (2015). Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dari kegiatan perekonomian yang berdampak semakin meningkat jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat, dan mendorong meningkatnya kemakmuran masyarakat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah (Astuti, 2015). Dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal yang dapat mendukung yaitu adanya aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian, misalnya jalan, jembatan, rumah sakit, pasar dan lainnya. Pada pemerintah daerah penambahan aset tetap dilakukan dengan pengeluaran berupa belanja modal. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan pengalokasian belanja modal dalam perencanaan pengeluarannya. Dengan pengalokasian belanja modal yang meningkat, misalnya pada perbaikan jalan, pembangunan jembatan dan infrastruktur lain diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian belanja modal tentunya tidak terlepas dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pentingnya belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP nomor 71, 2010). Belanja modal ini dapat meliputi belanja

tanah, gedung dan bangunan, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, belanja peralatan dan mesin, serta belanja aset tetap lainnya.

Penelitian mengenai kinerja keuangan terhadap pertumbuhan masih mendapatkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian Annisa (2011); Astuti (2015); Syamsudin (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan hasil penelitian Siregar (2016) yang menemukan hasil bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian dan efisiensi daerah tidak pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian mengenai alokasi belanja modal yang memoderasi kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi mendapatkan hasil yang bervariasi. Hasil penelitian Sukarmi dan IGA (2016) menunjukkan alokasi belanja modal memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara khusus interaksi alokasi belanja modal memperkuat pengaruh tingkat ketergantungan keuangan dan kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun interaksi alokasi belanja modal tidak memperkuat pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan desentralisasi, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun hasil penelitian Prihastuti dkk (2015) menunjukkan kinerja keuangan daerah secara tidak langsung (melalui alokasi belanja modal) kurang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal tidak memoderasi kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga hasil penelitian Siregar

(2016) yang menemukan hasil bahwa belanja modal tidak dapat sebagai variabel moderasi karena tidak memperkuat hubungan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Masih adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya, masih membuka peluang untuk diadakannya penelitian yang sejenis yaitu mengenai kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimoderasi alokasi belanja modal khususnya di daerah Eks – Karesidenan Kediri. Daerah Eks-Karesidenan Kediri yang terdiri dari 7 daerah, yang terbagi atas Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung. Daerah yang mempunyai fluktuasi pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya potensi daerah yang dimiliki sehingga memerlukan pengelolaan keuangan yang tepat, baik dari pendapatan daerah maupun belanja daerah.

KAJIAN TEORI dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kemampuan kinerja keuangan daerah dipergunakan untuk mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kemajuan daerah dapat ditinjau dari pertumbuhan ekonomi yang baik. Kinerja keuangan daerah dapat diukur menggunakan rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Dalam pengalokasian sumber keuangan daerah, belanja modal merupakan belanja yang dipergunakan untuk mendapatkan aset tetap, seperti infrastruktur, sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk pelayanan publik. Dengan meningkatnya infrastruktur, sarana dan prasarana maka tingkat pelayanan

kepada masyarakat akan meningkat, sehingga akan mendorong produktivitas, kegiatan perekonomian menjadi lancar, pendapatan masyarakat meningkat dan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi

1. Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Menurut Adhiantoko (2013) kinerja keuangan daerah adalah tingkat capaian hasil kerja dibidang keuangan meliputi anggaran dan realisasinya dengan indikator keuangan sesuai dengan perundangan dalam periode anggaran. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan daerah terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Perhitungan analisis rasio keuangan daerah dengan data APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama. Hal itu dilakukan untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Rasio-rasio yang dapat dipergunakan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah, di antaranya meliputi: rasio derajat

desentralisasi, rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio efektivitas, rasio efisiensi, serta rasio-rasio yang lain.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan dari kegiatan perekonomian yang berdampak pada produk domestik regional bruto yang berdampak pada meningkatnya kemakmuran masyarakat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah (Astuti, 2015). Ada tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Penelitian Hamzah (2008); Astuti (2015); Prihastuti dkk (2015) menunjukkan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri.

2. Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Dalam pemerintah daerah penambahan aset tetap dilakukan melalui pengalokasian belanja modal.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. (PP nomor 71 Tahun 2010). Belanja modal dipergunakan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk kepentingan pelayanan publik, yang dapat diwujudkan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan pelayanan publik, belanja modal jalan, jembatan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah umur ekonomis aset. Aset tetap yang dimiliki dari belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah, dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu perencanaan yang tepat dalam mengalokasikan dana anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Dengan pengalokasian belanja modal yang meningkat diharapkan pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat, sehingga pemerintah daerah perlu mengalokasikan belanja modal dengan memberikan alokasi belanja modal yang lebih banyak dibandingkan dengan alokasi belanja daerah yang lain.

Hasil penelitian Arini (2016) dan Putra (2016) menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Tepatnya alokasi belanja modal, seperti dipergunakan untuk pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur daerah dan fasilitas umum yang memadai akan berdampak pada peningkatan produktivitas daerah dan pendapatan masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis Hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_2 : Alokasi Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri.

3. Alokasi Belanja Modal Sebagai Moderator Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kinerja keuangan daerah dapat dikatakan tergantung dari bagaimana pengelolaan keuangannya. Kinerja keuangan daerah dapat diukur menggunakan rasio-rasio keuangan yang membandingkan antar komponen penerimaan dan pengeluaran daerah. Dari segi penerimaan keuangan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah maupun dari dana perimbangan. Pendapatan daerah dapat dipergunakan sebagai pengukuran dalam pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pendapatan daerah yang naik, dimungkinkan karena adanya peningkatan kegiatan perekonomian daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah maka pemerintah harus melakukan pendistribusian pengeluaran dalam bentuk belanja daerah yang meningkat pula

Belanja modal merupakan bagian dari keuangan daerah, pada sektor pengeluaran

pemerintah. Belanja modal dipergunakan untuk memenuhi infrastruktur, sarana dan prasarana untuk pelayanan publik. Alokasi belanja modal akan mempengaruhi belanja daerah yang lain. Pengalokasian belanja modal yang diwujudkan dalam aset tetap yang lebih banyak dalam APBD, diharapkan akan meningkatkan kegiatan perekonomian. Misalnya dengan dibangunnya atau diperbaikinya jalan, maka kegiatan transportasi penyaluran barang dan jasa akan menjadi lancar, hal ini akan mendorong meningkatnya perekonomian. Dengan adanya peningkatan belanja modal maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Sukarmi dan IGA (2016) menunjukkan secara umum alokasi belanja modal memperkuat pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Belanja modal dapat sebagai moderator kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara khusus interaksi alokasi belanja modal memperkuat pengaruh tingkat ketergantungan keuangan dan kemandirian keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Adapun pengaruh desentralisasi, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi dengan interaksi alokasi belanja modal tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis Hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_3 : *Belanja modal merupakan variable moderating pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel kinerja keuangan, alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Pengukuran variabel penelitian kinerja keuangan diukur menggunakan empat rasio keuangan daerah, yaitu (1) rasio kemandirian keuangan daerah, (2) rasio kemampuan daerah, (3) rasio efektivitas daerah, dan (4) rasio efisiensi keuangan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandiriannya (Mahmudi, 2010). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer pusat} + \text{transfer propinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemampuan keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara PAD yang mampu diperoleh dibandingkan dengan besarnya seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber. Rasio kemampuan keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{rasio kemampuan} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{Total penerimaan Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas keuangan daerah dilihat dari efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik (Halim dan Kusufi, 2014). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan daerah dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima. Rasio efisiensi keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{rasio efisiensi} = \frac{\text{biaya yang dianggarkan untuk penerimaan Pendapatan}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan}} \times 100\%$$

Pengukuran variabel alokasi belanja modal, dilakukan dengan melakukan perbandingan alokasi belanja modal dengan total belanja yang dilakukan selama satu periode. Rasio alokasi belanja modal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{alokasi belanja modal} = \frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{realisasi total belanja dalam APBD}} \times 100\%$$

Pengukuran variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan rasio pertumbuhan ekonomi. Rasio pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbandingan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_x - \text{PDRB}_{x-1}}{\text{PDRB}_{x-1}} \times 100\%$$

Populasi dalam penelitian ini adalah Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri, yang berjumlah 7 daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling*, yaitu pemilihan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2016). Teknik nonprobabilitas yang digunakan adalah *sampling jenuh*, dimana seluruh jumlah

populasi dijadikan sampel dikarenakan jumlah populasinya relatif sedikit. Daerah Kota Kabupaten yang dijadikan sampel terdiri dari 2 kota dan 5 kabupaten yaitu Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini meliputi data APBD dan realisasinya, serta data pertumbuhan ekonomi daerah kota dan Kabupaten Se-Ekskaresidenan Kediri dari Tahun 2009 sampai dengan 2016. Sumber data APBD dan realisasinya diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id, sedangkan data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur melalui website www.bps.go.id.

Teknik analisis data menggunakan analisis MSEM (*Moderating Structural Equation Modeling*) dengan software AMOS 21. Dalam MSEM terdapat ketergantungan hubungan yang kuat antara variabel eksogen dalam mempengaruhi variabel endogen. Dalam hal ini efek *moderating* dapat dikatakan sebagai interaksi antara variabel eksogen. Adapun kriteria pengujian, H_a diterima dan H_0 ditolak apabila nilai p -value $< 0,05$.

HASIL dan PEMBAHASAN

Analisis dan hasil SEM Moderating

Dalam analisis menggunakan SEM Moderating sesuai dengan variabel yang ada, yaitu X_1 adalah kinerja keuangan daerah, X_2 adalah alokasi belanja modal, dan Y adalah pertumbuhan ekonomi, tahap pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis pengaruh antara kinerja

keuangan daerah dan alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari SEM dengan menggunakan Amos 21.0 menghasilkan estimasi λ dan θ pada variabel kinerja keuangan daerah dan alokasi belanja modal seperti dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1 Error Variance dan Loading Factor

Indikator	Kinerja		Indikator	Alokasi Belanja Modal	
	θ (error variance)	λ (loading factor)		θ (error variance)	λ (loading factor)
x1.1	1,000	0,976	x2.1	1,000	0,981
x1.2	1,000	0,960		1,000	0,981
x1.3	261,278	0,341			
x1.4	30,176	0,006			
	293,994	2,283			

Untuk mendapatkan λ interaksi yang merupakan *loading factor* dari variabel laten interaksi dan *error variance* dari indikator variabel laten interaksi dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\lambda_{\text{moderating}} &= (\lambda_{x_{1,1}} + \lambda_{x_{1,2}} + \dots + \lambda_{x_{1,4}})(\lambda_{x_{2,1}}) \\ &= (2,283)(0,981) \\ &= 2,240\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\theta &= (\lambda_{x_{1,1}} + \lambda_{x_{1,2}} + \dots + \lambda_{x_{1,4}})^2 \text{VAR}(\text{kinerja})(\theta_{\text{alokasi}}) \\ &\quad + (\lambda_{x_{2,1}})^2 \text{VAR}(\text{alokasi})(\theta_{x_{1,1}} + \theta_{x_{1,2}} + \dots + \theta_{x_{1,4}}) \\ &\quad + (\theta_{x_{1,1}} + \theta_{x_{1,2}} + \dots + \theta_{x_{1,4}})(\theta_{x_{2,1}}) \\ &= (2,283)^2 (0,001)(1,000) + (0,981)^2 (25,043)(293,994) + (293,994)(1,000) \\ &= 7379,374\end{aligned}$$

Setelah λ moderating dan θ moderating diperoleh dari tahap pertama, maka nilai λ moderating sebesar 2,240 dan θ moderating sebesar 7379,374 dimasukkan pada tahap kedua.

Hasil akhir *moderating structural equation modeling* (MSEM) adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Standardized Regression Weight Structural Model

Kausalitas			Standardized Estimate	S.E.	C.R.	P
Pertumbuhan	<---	Kinerja	0,121	0,356	0,929	0,353
Pertumbuhan	<---	Alokasi	0,645	0,032	4,854	0,000
Pertumbuhan	<---	Moderator	0,001	0,000	7,454	0,000

Berdasarkan dalam tabel 1 di atas maka dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri

H_0 : $\beta_1 = 0$, kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

H_1 : $\beta_1 \neq 0$ kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan $\beta_1 = 0,121$ dengan p-value = 0,353 (terima H_0), hal ini berarti kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien *path* yang positif menunjukkan bahwa semakin baik kinerja keuangan daerah maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.

H_2 : Alokasi Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri.

H_0 : $\beta_2 = 0$, alokasi belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

$H_1 : \beta_2 \neq 0$, alokasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan $\beta_2 = 0,645$ dengan p-value = 0,000 (tolak H_0), hal ini berarti alokasi belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien *path* yang positif menunjukkan bahwa semakin baik alokasi belanja modal maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.

H_3 : Belanja modal merupakan variabel moderating pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Kediri.

Variabel moderating (interaksi kinerja keuangan daerah dengan alokasi belanja modal)

$H_0 : \beta_3 = 0$, variabel moderator tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

$H_1 : \beta_3 \neq 0$, variabel moderator berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan $\beta_3 = 0,001$ dengan p-value = 0,000 (tolak H_0), hal ini berarti variabel moderator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal dapat menjadi variabel moderator dari pengaruh antara kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, hipotesis pertama ditolak. Kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan daerah yang diprosikan oleh rasio kemandirian daerah, rasio kemampuan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer tidak mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat saja terjadi karena pendapatan asli daerah (PAD) dengan transfer daerah tidak mempengaruhi berkembangnya produk domestik regional bruto (PDRB) daerah tersebut. Besarnya PAD tidak menyokong PDRB daerah. Kinerja Demikian pula dengan rasio kemampuan keuangan daerah yang tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini karena realisasi PAD yang tinggi tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan peningkatan PDRB daerah. keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan antara realisasi PAD dengan target PAD yang diharapkan pada daerah kurang memenuhi *value for money*, sehingga kurang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dapat pula karena peningkatan PAD tidak mampu menghasilkan barang dan jasa yang merupakan pendapatan daerah, dapat dikarenakan penekanan PAD selama ini hanya pada bagaimana mencapai target

yang ditetapkan, yang bersumber pada penerimaan dari pajak, dan bukan pada peningkatan kegiatan perekonomian. Rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat disebabkan karena rasio belanja rutin dengan total pendapatan terlalu besar, adanya inefisiensi, sehingga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja mungkin hanya digunakan untuk belanja daerah yang bersifat rutin, misalkan belanja pegawai, pengalokasian untuk peningkatan perekonomian sedikit, sehingga sangat kecil mendorong peningkatan PDRB, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mengalami kenaikan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Prihastuti dkk (2015) yang menemukan hasil bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi yang dipergunakan untuk kegiatan produktif. Salah satu contoh pengeluaran produktif tersebut adalah dengan belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat disebabkan karena adanya perencanaan dan pelaksanaan alokasi belanja modal yang tepat, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalkan dengan bertambahnya pembangunan fasilitas umum yang menjadi investasi daerah, seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit yang dapat memperlancar roda perekonomian daerah, sehingga dapat meningkatkan PDRB, membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga pendapatan perkapita meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Arini (2016) dan Putra (2016), bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Alokasi belanja modal dapat sebagai moderator kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti adanya kinerja keuangan yang meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan dana transfer dialokasikan dengan perencanaan pengalokasian belanja daerah yang lebih menekankan pada belanja modal dibandingkan dengan belanja rutin yang lain. Perencanaan alokasi belanja modal juga harus tepat, yakni pengalokasian yang benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk menunjang perekonomian, dan hal ini akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengalokasian belanja modal untuk peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pelayanan kepada masyarakat akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Misalnya dengan pengalokasian belanja modal untuk perbaikan jalan dan jembatan, akan mempermudah akses perekonomian dengan mudahnya sarana transportasi, yang dapat mempermudah penyaluran barang dan jasa, sehingga mendorong meningkatnya perekonomian, dan dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sukarmi dan IGA (2016), bahwa belanja modal dapat sebagai moderator kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio ketergantungan dan kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa 1) kinerja

keuangan daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; (2) belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; (3) variabel moderator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau dapat dikatakan bahwa belanja modal dapat menjadi variabel moderator dari pengaruh antara kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan belanja modal dalam APBD yang dipergunakan untuk peningkatan infrastruktur akan mendorong lancarnya kegiatan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis, dengan menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Variabel yang dapat dimasukkan misalnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan tingkat utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhiantoko, H. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bora*. Skripsi tidak dipublikasikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Annisa, G.R. 2011. *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia, pengangguran dan kemiskinan dengan kinerja keuangan sebagai variabel anteseden (studi kasus pada pemerintah daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur)*. Skripsi tidak dipublikasikan Fakultas Ekonomi Akuntansi UII Yogyakarta.
- Arini, P.R. 2016. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan*. JRAMb, 2(2): 180-198.
- Astuti, W. 2015. *Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan (studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa periode 2007-2011)*. Jurnal EBBANK. 6(1): 1-18.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., dan M.S. Kusufi. 2014. *Akuntansi keuangan daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, A. 2008. *Analisa kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan: pendekatan analisis jalur (studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur periode 2001-2006)*. Jurnal SNA XI Pontianak. Online. Diakses pada tanggal 23 Januari 2017.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- Prihastuti, dkk. 2015. *Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota Riau*. Jurnal Sorot, 10(2): 143-154.
- Putra, A. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi di Kabupaten Sumatera Utara*. Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen, 3(1): 12-25.
- Sari, dkk. 2015. *Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara tahun 2004-2014*. Online. Diakses pada tanggal 25 Januari 2017.
<http://ssrn.com/abstract=2115816>
- Siregar. H. A. 2016. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi. Kurs 1(1): 140-152.
- Syamsudin, dkk. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan. Daya Saing, 17(1): 15-27
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarmi, N.W., dan Iga, N.B. 2016. *Alokasi belanja modal sebagai pemoderasi pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan bisnis Universitas Udayana. 5 (3): 545-572
- www.bps.go.id.
- www.djpk.depkeu.go.id,